

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ansori, Lutfil, *Legal Drafting*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Ashiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Darurat*, Pt Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Pers, Jakarta Pusat, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Busroh, Firman Freaddy, *Teknik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar)*, Cet. 1, Cintya Press, Jakarta, 2016.
- Falaakh, Mohammad Fajrul, *Pertumbuhan Dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden Dan DPR Dan Mahkamah Konstitusi (The Growth, Model And Informal Changes Of An Indonesian Constitution)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2014.
- Huda, Uu Nurul, *Hukum Lembaga Negara*, Pt Refika Aditama, Bandung, 2020.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet.8, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 10, Balai Pustaka, Jakarta, 2011.
- Sulaiman, King Faisal, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Cet.1, Nusa Media, Bandung, 2017.
- Taib, Mukhlis, *Dinamika Perundang-Undangan Indonesia*, Cet. 1, Pt Refika Utama, Bandung, 2017.
- Wahidin, Samsul, *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*, Cet. 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

## B. Jurnal Hukum

- A. Rosyid Al Atok, “*Checks And Balances Dalam Pembentukan Undang-Undang Dengan Sistem Bikameral Di 5 (Lima) Negara Kesatuan (Checks And Balances In Law Making Using Bicameral System In 5 (Five) Unitary State)*” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13 No. 03, 2016.
- Hezky Fernando Pitoy, “Mekanisme Checks And Balances Antara Presiden Dan DPR Dalam Pemerintahan Presidensial Di Indonesia”, Jurnal Lex Et Societatis, Vol II No. 5, 2014.
- Nirwan Moh Nur, “*Hubungan Kewenangan Antara Presiden Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*”, Jurnal Yustisiabel, Vol 1 No. 1, 2017.
- Rahayu Prasetyaningsih, “*Menakar Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No. 2, 2017.
- Sunarto. “*Prinsip Check and Balance Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*” Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No 2, 2016.
- Sulardi & Irmayadi Sastra. “*Check and Balance Kekuasaan Lembaga Negara Guna Menata Pemerintahan Yang Baik (Good Government)*” Jurnal Hukum Replik, Vol 5 No 2, 2017.
- Tigor Einstein et al, “*Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang-Undangan,*” Jurnal Sosial & Budaya Syar’i, Vol 7 No. 7, 2020.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU Nomor 12 Tahun 2011. LNRI Tahun 2011 Nomor 82. TLNRI Nomor 5234.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU Nomor 15 Tahun 2019. LNRI Tahun 2019 Nomor 183 . TLNRI Nomor 6398.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan

Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang. Nomor 2 Tahun 2020. LNRI Tahun 2020 Nomor 134. TLNRI Nomor 6516.

---

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Keuangan. Perpu Nomor 1 Tahun 2020. LNRI Nomor 87. TLNRI Nomor 6485.

---

Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MPR, DPR DPD, dan DPRD). UU Nomor 2 Tahun 2018. Lnri Tahun 2016 Nomor 29. Tlnri Nomor 6187.

#### **D. Dokumen**

Laporan Badan Anggaran DPR RI Mengenai Hasil Pembicaraan TK.I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 9 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Risalah Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2019-2020 Masa Persidangan III Rapat Ke-15 Tanggal 12 Mei 2020.

#### **E. Internet**

<https://www.bphn.go.id/analisis>.

<https://www.kemkes.go.id>.

<http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>.

<https://setkab.go.id/ini-penjelasan-menkeu-soal-latar-belakang-perpu-nomor-1-tahun-2020>.

<https://nasional.kompas.com/read/2020>.

<https://www.mkri.id/index.php?Page=web.Berita&id=16366&menu=2>.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/05/10501301/dpr-setuju-perppu-stabilitas-ekonomi-untuk-penanganan-covid-19-disahkan-jadi?Page=all>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28732/t/DPR+Sahkan+Perppu+Nomor+1+Tahun+2020+Jadi+UU#:~:text=DPR%20RI%20>